

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian dunia yang bergejolak akibat krisis ekonomi global selama ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi domestik Indonesia secara umum maupun Kabupaten Malang secara khusus. Namun sejak satu tahun terakhir, beberapa negara seperti Amerika Serikat mulai *recovery* dan bangkit dari keterpurukan ekonomi global. Menguatnya mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang negara lainnya, termasuk Indonesia ditambah dengan harga minyak dunia yang semakin merosot, bahkan mencapai harga terendah sejak Bulan Juli 2010 menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang semakin kuat. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan dimulai tanggal 31 Desember 2015. Dengan MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Indonesia secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan Indonesia perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia akan menjadi aset berharga bagi Indonesia untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan nasional.

Kebijakan umum pembangunan Kabupateb Malang tahun 2016 adalah :1) melanjutkan pembangunan tahun-tahun sebelumnya terutama yang sudah menjadi prioritas 5 tahunan; 2) menyelenggarakan urusan-urusan wajib dan pilihan yang merupakan amanat otonomi daerah terutama urusan pendidikan, kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat; 3) mengembangkan potensi ekonomi yang ada untuk sebesar-besarnya mendukung kesejahteraan masyarakat seperti pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, pariwisata terutama ekowisata dan jasa-jasa; 4) memberdayakan masyarakat perdesaan dalam rangka pengurangan kemiskinan dan

pengangguran serta mengurangi desa tertinggal; 5) Mendorong berkembangnya lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 6) menyelenggarakan reformasi birokrasi dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Fokus pembangunan Kabupaten Malang tahun 2016 ditujukan pada :1) Melanjutkan Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur melalui pemeliharaan dan pembangunan baru sarana kebinamargaan, pengairan, keciptakarya dan tata ruang serta permukiman dengan mengutamakan infrastruktur yang secara langsung mendukung perekonomian; 2) Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi komoditas andalan seperti pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa serta mendorong pengembangan pariwisata; 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat guna memudahkan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang murah dan bermutu serta kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 4) Penanggulangan Kemiskinan, dalam rangka mendorong pertumbuhan yang mengarah pada rakyat miskin dan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; 5) Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan dalam rangka pengelolaan pembangunan perdesaan; 6) Optimalisasi Pengelolaan Sumber daya Alam, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

Indikator makro lainnya yaitu Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) tahun 2014 sebesar Rp. 53.794.468 juta tahun 2015 ditargetkan menjadi sebesar Rp. 58.086.549 juta. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) tahun 2014 sebesar Rp.18.992.150 juta dan tahun 2015 ditargetkan menjadi sebesar Rp. 20.555.992 juta. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2014 sebesar 6,09%, tahun 2015 ditargetkan sebesar 6,87%. Laju Inflasi tahun 2014 sebesar 8,28% dan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 7,98%. Pendapatan

Perkapita ADHB tahun 2014 sebesar Rp. 19.247.046,- dan tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.22.510.415,-

3.1.2. Isu Strategis 2016 – 2017

Beberapa Isu strategis utama untuk tahun 2016-2017 yang sudah mengemuka baik yang berskala global, nasional, maupun regional Jawa Timur dan Kabupaten Malang antara lain:

1. Isu berskala global: a) Kondisi perekonomian global masih belum sepenuhnya stabil sebagai dampak krisis ekonomi negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya yang dapat berdampak pada perkembangan perekonomian nasional. b) Rencana penerapan pasar tunggal Asean tahun 2015 (*Asean Economic Community*) dimana persaingan produk antar negara Asean akan semakin ketat termasuk produk-produk Kabupaten Malang.
2. Isu berskala nasional: a) Semakin besarnya Subsidi dan Instabilitas Harga Komoditi ; b) Situasi pangan di Indonesia pada 2014 tidak lebih baik dibandingkan 2013. Hal ini ditandai dengan meningkatnya impor lima komoditas pangan utama. Hal ini disebabkan sistem pangan nasional terintegrasi dengan sistem pangan global yang menyebabkan Indonesia masuk dalam “jebakan impor pangan”; c) Perubahan peraturan perundangan seperti terbitnya Undang - Undang Nomor 6 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kedua peraturan perundangan tersebut memberikan beberapa konsekuensi yang diantaranya: 1) Pada tingkatan Kabupaten, beberapa SKPD terdapat kewenangan yang dialihkan ke tingkat Provinsi seperti urusan kehutanan, energi dan sumber daya mineral serta perikanan dan kelautan. Perubahan kewenangan dan nomenklatur program kegiatan akan berpengaruh dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD tahun 2016; 2) Pada tingkatan Desa, kewenangan Desa didasarkan pada kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Pelimpahan kewenangan tersebut akan berpengaruh pada daftar usulan rencana kegiatan dalam RKP Desa dan pelaksanaan kegiatan berskala lokal desa; f) penyelesaian & konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. g) pengelolaan keuangan daerah. h) pencegahan dan pemberantasan korupsi. i) penyelenggaraan

pemilukada serentak tahun 2015. j) penanganan stabilitas politik dalam negeri.

3. Isu berskala regional Jawa Timur: a) Masih perlunya peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. b) Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan. c) Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja. d) Percepatan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan serta jaringan listrik. e) Pengurangan kemiskinan dan pengangguran. f) Peningkatan investasi daerah. g) Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Isu berskala lokal Kabupaten Malang: a) Sebagai daerah agraris perekonomian Kabupaten Malang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim yang ekstrem dan lingkungan yang tidak stabil dan masih didominasi oleh produk pertanian primer. b) Infrastruktur terutama jalan dan irigasi masih belum mencukupi baik kuantitas maupun kualitas. c) Partisipasi pendidikan masih perlu dipacu peningkatannya. d) Jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. e) Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. f) Peningkatan SDM aparatur desa terkait implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. g) Peningkatan layanan publik melalui reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik

3.1.3 Analisis Lingkungan

1. Kekuatan

- a. Letak geografis dan tata ruang wilayah yang strategis;
- b. Tersedia sarana perhubungan darat, laut, udara dan kereta api;
- c. Tersedia sumber daya alam pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang cukup besar;
- d. Tersedia perusahaan industri dan perdagangan besar serta obyek wisata;
- e. Tersedia lembaga/tokoh/pakar keagamaan dan pendidikan keagamaan yang cukup banyak;
- f. Tersedia sumber daya manusia usia angkatan kerja yang cukup besar;
- g. Tersimpan peninggalan sejarah dan budaya luhur bukti kejayaan masa lalu.

2. Kelemahan

- a. Produktifitas hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai andalan masih belum optimal dan potensi wisata belum dikelola secara optimal;
- b. Kondisi jalan/jembatan untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa sebagian belum mantap dan masih kurang serta keterbatasan akses jalan di beberapa kawasan tertentu dan didaerah kondisi medan yang sulit;
- c. Kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai menjadi salah satu penyebab produk kebijakan pemerintah yang kurang efektif;
- d. Penduduk miskin dan pengangguran masih cukup banyak;
- e. Kebanyakan usaha ekonomi rakyat merupakan usaha non formal, sehingga seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan dari lembaga perbankan maupun program-program penguatan ekonomi rakyat lainnya yang membutuhkan aspek legal formal, padahal sektor usaha ekonomi rakyat tersebut merupakan salah satu pilar ekonomi Kabupaten Malang;
- f. Terdapat kawasan rawan bencana gunung berapi, tanah longsor, banjir dan tsunami;
- g. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih relatif rendah, sehingga daya dukung lingkungannya menjadi rendah, disamping itu kondisi kesehatan lingkungan perlu banyak pembenahan, terutama dalam hal penanganan sampah, air bersih, sanitasi dan polusi;
- h. Terbatasnya peluang investasi karena keterbatasan sarana dan prasarana antara lain belum tersedia kawasan industri.

3. Peluang

- a. Terbukanya pasar bebas di era globalisasi baik regional maupun internasional, seperti *ASEAN Economic Community* (AEC) dan *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA), menjadi potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional dan daerah.
- b. Peluang akses pasar untuk produk produk Indonesia termasuk Kabupaten Malang terbuka cukup besar, terutama ke Cina, yang berpenduduk lebih besar dari Eropa. Sementara dengan diberlakukannya AEC 2015,

maka peluang kerjasama perdagangan serta pintu pasar dengan Negara negara ASEAN juga semakin terbuka bebas.

- c. Adanya *political will* secara nasional untuk memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan;
- d. Adanya program nasional percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dibidang kebinamargaan, pengairan, keciptakarya/ perumahan rakyat dan energi;
- e. Adanya program nasional pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan daerah tertinggal/desa tertinggal;
- f. Ditetapkannya Malang Raya sebagai salah satu pusat wilayah pengembangan Provinsi Jawa Timur dimana Kabupaten Malang sebagai andalan pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan pariwisata;
- g. Terbukanya peluang kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah baik antar daerah di dalam maupun di luar negeri;
- h. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.

4. Ancaman

- a. Globalisasi dan perdagangan bebas di satu sisi merupakan ancaman namun di sisi lain merupakan tantangan untuk terus kreatif, inovatif dalam memproduksi barang dan jasa yang memiliki daya saing;
- b. Di samping itu, dengan berlakunya AEC perlu diwaspadai dampak negatif yang mungkin muncul, antara lain membanjirnya produk-produk negara-negara anggota ASEAN. Jika hal ini tidak disikapi dengan upaya-upaya pengamanan dan perlindungan produk dalam negeri secara bijak, maka tidak menutup kemungkinan AEC dapat mengancam perekonomian Indonesia terutama di daerah
- a. Fluktuasi harga minyak dan perekonomian dunia yang masih terjadi hingga awal tahun 2013 berdampak luas pada perekonomian nasional dan daerah yang perlu disikapi dengan penguatan struktur perekonomian domestik dan penguatan ketahanan pangan masyarakat;

- b. Angka pertumbuhan penduduk masih tinggi sehingga perlu peningkatan kualitas keluarga dan pemasyarakatan kembali norma keluarga sejahtera;
- c. Angka kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berfluktuatif serta potensi ancaman SARA terkadang masih ada;
- d. Lingkungan hidup yang rusak dan perubahan iklim yang tidak harmonis perlu terus ditangani dan dikelola secara berkelanjutan.

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2015 - 2016

Tantangan dalam pembangunan perekonomian Tahun 2015-2016 diperkirakan sebagai berikut:

1. Implementasi ASEAN *Economic Community* (AEC) memberikan tantangan bagi persaingan tenaga kerja profesional;
2. Dampak pengurangan subsidi dan berfluktuasinya harga BBM dunia mengakibatkan ketidakpastian ekonomi;
3. Koordinasi yang belum optimal antar sektor;
4. Masih rendahnya kualitas SDM mengakibatkan daya saing yang rendah;
5. Pelaksanaan Pilkada serentak pada akhir tahun 2015 yang menuntut langkah antisipatif dampak ekonomi lokal;
6. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal dan daya saing produk daerah;
7. Infrastruktur terutama jalan, jembatan belum memadai bagi pengembangan investasi baik di bidang industri dan perdagangan maupun pariwisata;
8. Pertumbuhan ekonomi masih lamban sesuai dengan karakter perekonomian berbasis pertanian primer;
9. Masih diperlukan upaya yang komprehensif dan terpadu lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin dan pengurangan pengangguran;
10. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam lokal.
11. Kondisi alam dan lingkungan yang rusak dan iklim yang ekstrem berpengaruh kepada usaha pertanian sebagai basis perekonomian Kabupaten Malang;

- 12. Pelayanan publik dirasakan belum memuaskan dan sumber pembiayaan masih sangat terbatas serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 13. Sarana dan prasarana perekonomian dan pariwisata masih perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Malang Tahun 2014 dan perkiraan 2015, maka prospek perekonomian Tahun 2016-2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. PDRB ADHB pada tahun 2016 diprediksi akan menjadi Rp.64.386.240 juta dan tahun 2017 meningkat Rp.70.322.561 juta.
- 2. PDRB ADHK pada tahun 2016 diprediksi menjadi Rp.21.705.516 juta dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.23.227.073 juta.
- 3. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan akan tetap mengalami perbaikan yaitu diperkirakan tumbuh hingga 6,6%-6,94% dan tahun 2017 tumbuh hingga 6,7%-7,01%.
- 4. Inflasi tahun 2016 diperkirakan sekitar 7,06% dan pada Tahun 2017 inflasi diprediksi sebesar 6,33%.
- 5. Pendapatan Perkapita pada tahun 2016 diprediksi sebesar Rp.25.081.978,- dan tahun 2017 menjadi sebesar Rp.27.177.736,-

Dalam mencapai target pertumbuhan tahun 2016 diperlukan kontribusi sektor-sektor andalan untuk menjadi lokomotif penggerak perekonomian Kabupaten Malang, hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Prediksi Kontribusi Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHK

SEKTOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Primer</i>						
1. Pertanian	28,48	27,87	27,04	26,26	25,48	24,74
2. Pertambangan & Penggalian	2,57	2,50	2,45	2,39	2,32	2,26
<i>Sekunder</i>						
3. Industri Pengolahan	18,84	19,04	19,37	19,65	19,93	20,20
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,72	0,73	0,73	0,73	0,74	0,75

SEKTOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5. Bangunan	1,97	2,07	2,16	2,24	2,33	2,43
<i>Tersier</i>						
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	26,98	27,31	27,83	28,33	28,83	29,27
7. Pengangkutan & Komunikasi	3,32	3,38	3,40	3,43	3,47	3,51
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,33	4,38	4,42	4,47	4,52	4,57
9. Jasa-jasa	12,79	12,72	12,60	12,48	12,37	12,27

Tabel 3.2
Realisasi dan Prediksi Kontribusi Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2012-2016

SEKTOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Primer</i>						
1. Pertanian	25,35	24,75	23,76	22,88	22,00	21,18
2. Pertambangan & Penggalan	2,07	1,98	1,92	1,85	1,79	1,72
<i>Sekunder</i>						
3. Industri Pengolahan	21,90	22,13	22,48	22,81	23,13	23,43
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,81	0,79	0,78	0,76	0,75	0,73
5. Bangunan	2,40	2,48	2,66	2,82	2,96	3,10
<i>Tersier</i>						
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	28,51	28,98	29,56	30,13	30,70	31,23
7. Pengangkutan & Komunikasi	3,56	3,67	3,68	3,72	3,77	3,82
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,23	4,26	4,33	4,38	4,43	4,48
9. Jasa-jasa	11,17	10,96	10,82	10,65	10,47	10,30

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan

ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada:

1. Mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
2. Pembaruan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah;
3. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
4. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan masyarakat.

Berikut adalah hasil analisis realisasi, target dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Malang:

Tabel 3.4

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 s/d Tahun 2016

NO	URAIAN PENDANAAN	REALISASI			TARGET TAHUN 2015	PROYEKSI**) TAHUN 2016
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014*		
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	2.218.403.705.874	2.529.685.862.152	3.058.669.154.997	3.155.899.210.513	3.424.661.489.075
1.1	Pendapatan Asli Daerah	197.253.958.805	262.267.260.455	411.182.984.271	333.189.097.399	440.153.610.132
1.1.1	Pajak Daerah	71.301.888.447	95.918.841.193	153.924.838.046	133.160.000.000	174.471.474.800
1.1.2	Retribusi Daerah	42.775.834.435	45.314.153.759	51.905.681.732	33.970.193.235	38.535.116.884
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.508.131.833	12.007.868.773	12.670.468.248	13.013.536.536	14.094.704.744
1.1.4	Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah	72.668.104.090	109.026.396.729	192.681.996.245	153.045.367.628	213.052.313.706
1.2.	Dana Perimbangan	1.547.448.684.110	1.700.485.365.220	1.831.998.927.025	1.895.573.664.305	1.886.652.823.763
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	147.598.457.110	148.938.981.220	129.756.776.025	174.224.087.305	165.303.246.763
1.2.2	Dana Alokasi umum	1.281.612.867.000	1.439.234.034.000	1.572.191.571.000	1.613.161.777.000	1.613.161.777.000
1.2.3	Dana Alokasi khusus	118.237.360.000	112.312.350.000	130.050.580.000	108.187.800.000	108.187.800.000
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	473.701.062.959	566.933.236.477	815.487.243.701	927.136.448.809	1.097.855.055.180
1.3.1	Hibah	-	-	949.656.000	1.250.000.000	1.550.344.000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Dari Propinsi	109.308.887.959	127.284.469.477	206.032.406.701	151.684.781.025	200.046.540.396
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	295.633.435.000	370.878.002.000	452.738.931.000	529.637.574.784	608.190.322.784
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi	68.758.740.000	68.770.765.000	155.766.250.000	244.564.093.000	288.067.848.000

Sumber : DPPKA
Catatan : * Merupakan asumsi berdasarkan trend beberapa tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Malang mendapatkan alokasi anggaran tersebut, namun perkembangannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat penyusunan KUA PPAS maupun RAPBD.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2016 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membiayai urusan wajib dan pilihan dengan mengutamakan bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan mengutamakan jalan dan jembatan serta sarana perhubungan lainnya;
4. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
5. Memenuhi komitmen kerjasama/kemitraan pembangunan dan pembiayaan;
6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang:

Tabel 3.5
**Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 s/d Tahun 2016**

NO	URAIAN PENDANAAN	REALISASI			Plafon 2015	PROYEKSI TAHUN 2016
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014		
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA DAERAH	2.221.707.105.581	2.444.509.395.392	2.864.343.999.118	3.302.969.222.643	3.686.842.937.092
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.379.523.031.519	1.511.241.974.353	1.629.572.341.704	1.927.321.385.532	2.156.349.903.105
2.1.1	Belanja Pegawai	1.156.376.744.129	1.239.250.421.797	1.381.411.861.626	1.552.082.077.634	1.736.519.950.871
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	48.098.809.250	85.708.808.180	115.434.068.600	83.705.526.000	93.652.467.219
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	65.000.503.289	66.234.873.200	15.115.149.000	17.585.950.000	19.675.733.307
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab/Kota dan Pemdes	13.433.633.883	14.631.182.317	15.303.673.890	31.922.447.987	35.715.873.928
2.1.7	Belanja Bantuan Keu. Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemdes	95.618.528.968	705.400.227	769.032.588	237.025.383.911	265.191.715.023
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	994.812.000	1.695.673.632	2.499.375.000	5.000.000.000	5.594.162.757
2.1.9	Belanja transfer bantan keuangan ke desa	-	103.015.615.000	99.039.181.000		
2.2	Belanja Langsung	842.184.074.062	933.267.421.039	1.234.771.657.414	1.375.647.837.111	1.530.493.033.987
2.2.1	Belanja Pegawai	73.580.427.278	87.198.262.349	118.258.996.400	119.171.867.982	132.586.050.640
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	304.298.404.332	409.567.656.162	615.008.100.380	712.635.471.366	792.850.899.245
2.2.3	Belanja Modal	464.305.242.452	436.501.502.528	501.504.560.634	543.840.497.763	605.056.084.102

Sumber : LKPJ 2013, DPPKA, RPJMD 2010-2015
Catatan : * Dalam perkembangannya terus akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan KUA dan PPAS maupun APBD;
** Angka belanja langsung sangat bersidat indikatif dalam perkembangan akan disesuaikan dengan kondisi obyektif pada saat penyusunan KUA dan PPAS maupun APBD.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah. Adapun arah kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan;
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, agar waktu

penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagai upaya peningkatan sumber pembiayaan dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- 2. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja;
- 3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Berikut adalah hasil analisis realisasi, rencana dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Malang:

Tabel 3.6
**Realisasi, Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2012 s/d Tahun 2016**

NO	URAIAN PENDANAAN	REALISASI			TARGET TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014		
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	166.435.673.483	123.134.944.547	217.172.991.116	148.070.012.130	148.070.012.130
3.1.1	SiLPA	166.435.673.483	123.124.944.547	194.440.358.299	118.070.012.130	118.070.012.130
3.1.2	Pencairan Dana cadangan	-	-	22.732.632.818	30.000.000.000	30.000.000.000
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan daerah	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali pemberian pinjaman	-	10.000.000	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-

3.2	Pengeluaran Pembiayaan	39.180.340.000	17.694.629.139	20.572.985.162	1.000.000.000	1.000.000.000
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	10.000.000.000	16.694.629.139	19.572.985.162		
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	28.180.340.000	-	-		
3.2.3	Pembayaran pokok utang	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-		
Pembiayaan Netto		127.255.333.483	105.440.315.408	196.600.005.954	147.070.012.130	

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset